



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SULAWESI UTARA
TAHUN 2020



Jalan Manembo-Nembo Tendeke
Sagerat Dua ,Matuari
Kota Bitung



badiklat-sulut.kemenkumham.go.id



Diklatkumhamsul



badiklatkumhamsulut



Balai Diklat Kumham Sulut

KATA PENGANTAR

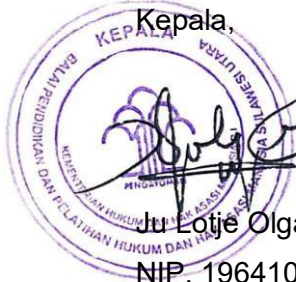
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini dengan baik. Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan deskripsi dan paparan atas kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020

Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini menjelaskan tentang rencana dan capaian kinerja serta penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini kami sampaikan, semoga laporan ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Pimpinan untuk meningkatkan strategi dan target kinerja pada tahun 2021. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Ju Lotje Olga
NIP. 196410201985032001



DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki dalam berdirinya suatu organisasi/instansi adalah lah sumber daya manusia. Sumber daya manusia inilah yang akan mengelola organisasi tersebut agar dapat terus berjalan dan berkembang. Namun agar dapat dikelola dengan baik maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai agar mempunyai kemampuan dan kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing. Berdasarkan tugas tersebut maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dimaksudkan sebagai wujud kewajiban Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana penilaian dan perbaikan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara di masa mendatang.

B. Visi, Misi, dan Tata Nilai

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai visi, misi, tujuan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Tahun 2020-2024 diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam hal mentalitas kemandirian, budaya kegotong royongan, dan budaya pelayanan. Adanya tuntutan perubahan paradigma tersebut, jika dikolaborasikan dalam kelima tanggungjawab besar Kementerian Hukum dan HAM, maka dapat dimaknai bahwa diperlukan landasan yang kuat dan kokoh dalam hal menghasilkan produk hukum, agar mampu merubah mental dan budaya masyarakat Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM serta meniti sebuah strategi Corporate University (CORPU) sebagai manajemen organisasi yang didesain untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan strategis melalui pelaksanaan aktifitas yang menempa pembelajaran dan pengetahuan individual maupun intitusional sehingga membentuk Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai **visi** yaitu :

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Makna dari visi ini adalah Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berperilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan **misi** sebagai berikut:

Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional.

Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.



Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan. Guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan tata nilai yang dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dengan menjunjung nilai

PASTI :

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sementara itu tujuan yang ingin dicapai Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara adalah:

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada Kementerian Hukum dan HAM di daerah

C. Tugas dan Fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas tersebut disesuaikan dengan wilayah kerjanya masing-masing. Saat ini telah dibentuk tiga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM di Indonesia, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Pembagian wilayah kerja dari masing-masing Balai

Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	Batam, Kepulauan Riau	Provinsi : 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Sumatera Selatan 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Bangka Belitung
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Bitung, Sulawesi Utara	Provinsi : 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. Papua 10. Papua Barat
3	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	Semarang, Jawa Tengah	Provinsi : 1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Selatan 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Bali 10. Nusa Tenggara Barat 11. Nusa Tenggara Timur

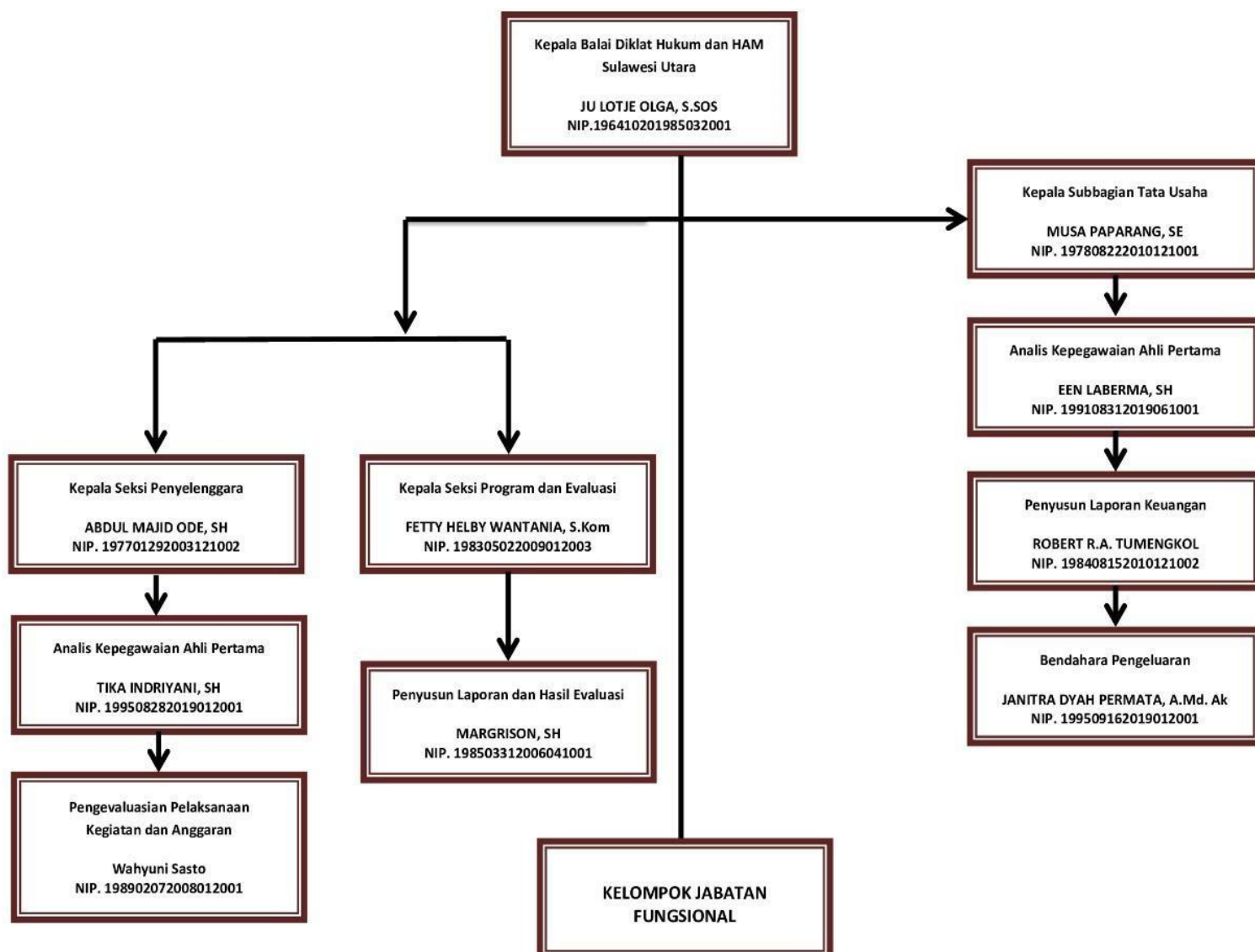
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara



Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Balai Diklat;
2. 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
2. 2 (dua) orang Kepala Seksi :
 - Kepala Seksi Penyelenggaraan
 - Kepala Seksi Program dan Evaluasi

Jabatan	Jumlah
Eselon III	1 orang
Eselon IV	3 orang
JFU	5 orang
JFT	2 orang
Jumlah	10 orang

Sebagaimana struktur organisasi di atas, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 10 SDM

E. Sumber Daya Manusia

Pembagian tugas dan wewenang Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Seksi Program dan Evaluasi

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah.

3. Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan persiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

F. Peran Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara

G. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan,

Menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan LKIP serta tugas, fungsi dan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara

Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai perencanaan kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan program kerja, serta informasi mengenai anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020;

Bab IV – Penutup, menyajikan ringkasan mengenai tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tahun Anggaran 2020 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

PERENCANAAN

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target

Berikut informasi sasaran kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target, Program, dan Pagu yang harus dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara selama Tahun Anggaran 2020 :

Sasaran Strategis	IKU	Target	Program	Pagu 2020 (Rp)
Meningkatnya kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di Kantor Wilayah	300 orang	Diklat teknis (klasikal dan e-learning serta Pelatihan Jarak Jauh	2.702.167.000
	Tersedianya layanan internal dukungan manajemen satker	1 layanan		428.843.000
	Terselenggaranya Layanan sarana dan prasarana	1 layanan		8.600.000.000
	Terselenggaranya layanan gaji dan perkantoran	1 layanan	-	1.393.881.000

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja atas apa yang menjadi sasaran strategis demi tercapainya target kinerja yang telah ditentukan. Adapun rencana kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020 adalah :

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Satuan	Target
Meningkatnya kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di Kantor Wilayah	Pelatihan Teknis (klasikal dan e-learning serta PJJ(Pelatihan Jarak Jauh)	orang	300
	Tersedianya layanan internal dukungan manajemen satker	-	layanan	1
	Terselenggaranya layanan gaji dan perkantoran	-	layanan	1

B. Anggaran Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2019 dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan DIPA Nomor : SP.DIPA-013.12.2.409159/2020 tanggal 12 November 2019; adalah sebesar Rp 13.124.891.000 dengan rincian sebagai berikut.

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Pagu 2020 (Rp)
5249	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i>	13.124.891.000
5249.001	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	2.702.167.000
5249.100	<i>Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	428.843.000
5249.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1.393.881.000
	Jumlah	13.124.891.000

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai target kerja sesuai dengan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

PROGRAM 1 : DIKLAT TEKNIS (KLASIKAL DAN E- LEARNING/PJJ) DAN COMMUNITY OF PRACTICE

Pendidikan dan pelatihan merupakan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para aparatur sesuai dengan bidang/jabatannya masing-masing. Pendidikan dan pelatihan ini tentunya sangat penting mengingat sumber daya manusia merupakan penggerak suatu organisasi sehingga dibutuhkan insan yang handal, berkompeten, dan terampil.

>>> Diklat Teknis (Klasikal dan E-Learning serta PJJ)

Diklat teknis terdiri atas pelatihan klasikal dan pelatihan e-learning. **Pelatihan klasikal** dilakukan secara langsung (tatap muka) antara peserta dan pengajar (Widya Iswara) pada satu tempat pelatihan. Kegiatan ini memberi ruang yang cukup banyak bagi peserta dan pengajar untuk berinteraksi dan tanya jawab. Selain itu juga mempermudah peserta untuk menerima materi dan pelatihan secara langsung.

Berbeda dengan pelatihan klasikal, bentuk penyelenggaraan diklat berbasis teknologi informasi berupa website yang diterapkan di bidang pendidikan adalah **E-Learning/PJJ**. Sistem pembelajaran ini dapat diakses di mana saja dengan menghubungkannya pada jaringan internet. E-Learning/PJJ telah mempersingkat waktu pelatihan dan membuat biaya pelatihan lebih ekonomis karena hanya membutuhkan koneksi internet.



Persamaan dan perbedaan antara diklat klasikal dan diklat e-learning/PJJ yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	INDIKATOR	DIKLAT KLASIKAL	DIKLAT E-LEARNING/PJJ
1	Sistem pelaksanaan	Langsung (tatap muka)	Online
2	Persyaratan Umum	Usia maksimal 40 tahun; Sehat jasmani dan rohani; Memiliki loyalitas dan dedikasi yang baik	Usia maksimal 40 tahun; Sehat jasmani dan rohani; Memiliki loyalitas dan dedikasi yang baik Mampu mengoperasikan perangkat komputer
3	Metode Pembelajaran	ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik/simulasi, dan latihan	diskusi, chatting, belajar mandiri, tanya jawab, ujian online/offline
	Tenaga Pengajar	penceramah dan Widya Iswara dari BPSDM Hukum dan HAM tim pengajar dari Kantor Wilayah tim pengajar dari instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan diklat tersebut (jika diperlukan)	Widya Iswara dari BPSDM Hukum dan HAM
5	Fasilitas dan Akomodasi	diwajibkan tinggal di tempat diklat fasilitas pelatihan berupa ruang kelas atau meeting room yang dilengkapi dengan LCD, white board, flip chart, dan fasilitas pendukung lainnya	tidak memerlukan tempat diklat fasilitas yang diperlukan berupa PC
6	Kualifikasi Kelulusan	Skor 90,1 – 100 : Sangat Memuaskan Skor 80,1 – 90 : Memuaskan Skor 70,1 – 80 : Cukup Memuaskan Skor 60,1 – 70 : Kurang Memuaskan	Penilaian keaktifan, peserta dinyatakan lulus jika keaktifannya ≥ 50 Penilaian ujian, peserta dinyatakan lulus jika nilai ujiannya ≥ 70
	Penghargaan	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Sebelum menyelenggarakan diklat tentunya Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait seperti:

- BPSDM Hukum dan HAM terkait rencana pelaksanaan dan permintaan tenaga Penceramah dan Widya Iswara;
- Kantor Wilayah terkait permintaan nama-nama calon peserta dan kesediaan tenaga pengajar;
- Lembaga pelatihan atau hotel sebagai tempat penyelenggaraan dan penyedia fasilitas;
- Pihak lain yang memiliki keterkaitan guna mendukung dan memberi materi pembelajaran bagi peserta.

Apabila persiapan tersebut telah dilakukan maka Balai Diklat akan melakukan pemanggilan calon peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut

Pada Tahun Anggaran 2020, Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara telah menyelenggarakan 3 (tiga) diklat klasikal dan 3 (tiga) diklat e-learning serta 4(empat) pelatihan jarak jauh (PJJ) dan Community of Practice 14 Episode dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pelatihan	Tempat Penyelenggaraan	Peserta	Lulus	L/P	Keterangan
1	Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I	Hotel Gran Central Manado	40	40	Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang	Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan
2	Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan II	Hotel Gran Central Manado	40	40	Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang	Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan
3	Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan I	Wisma Haji Manado	40	40	Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang	Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan

4	Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan II	Satker Masing-masing peserta(Metode E-learning)	40	30	Laki-laki berjumlah (37 orang) Perempuan berjumlah (3 orang) Total 40 orang	Tidak lulus: (10 orang)karena tidak mengikuti pelatihan sampai akhir
5	Pelatihan Pengamanan Tingkat Lanjutan Angkatan I dan II		40	34	Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang	Tidak lulus: (6 orang)karena tidak mengikuti pelatihan sampai akhir
			40	34	Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang	Tidak lulus: (6 orang)karena tidak mengikuti pelatihan sampai akhir
7	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I	Satker Masing-masing peserta(Metode PJJ)	40	40	Laki-laki berjumlah (29 orang) Perempuan berjumlah (11 orang) Total 40 orang	Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan
8.	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan II		40	40	Laki-laki berjumlah (28 orang) Perempuan berjumlah (10 orang) Total 40 orang	Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan
9.	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan III		40	40	Laki-laki berjumlah (29 orang) Perempuan berjumlah (11 orang) Total 40 orang	Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan
10.	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Angkatan XXI		40	40	Laki-laki berjumlah (38 orang) Perempuan berjumlah (2 orang) Total 40 orang	Seluruh Peserta Telah Mengikuti Pelatihan

1. Pelatihan Pengawasan Keimigrasian Angkatan (KLASIKAL) I- III TA 2020

Pelatihan ini dimaksud untuk pengembangan sumber daya bagi pegawai Imigrasi di bagian pengawasan dan penindakan untuk mampu mendukung terhadap kebijakan pemerintah juga dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul dari perlintasan orang antar, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Hasil kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I-II TA 2020:

No.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelatihan Pengawasan Keimigrasian Angkatan I-II Tahun Anggaran 2020	Angkatan I 09 s/d 15 Februari 2020	40 orang Peserta	40 orang Peserta	—	STTPL Telah dikirim ke peserta
		Angkatan II 23 s/d 29 Februari 2020	40 orang Peserta	40 orang Peserta	—	STTPL Telah dikirim ke peserta

2. Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar pada Lapas dan Rutan Angkatan I TA 2020 (KLASIKAL)

Pelatihan ini juga merupakan program di bidang Pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Petugas Pemasyarakatan dalam pengamanan Lapas dan Rutan dan kegiatan Pelatihan ini berbentuk Klasikal karena pelaksanaannya sebelum terjadi Pandemi COVID 19

Hasil kegiatan Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar pada Lapas dan Rutan Angkatan I dan II TA 2020 :

No.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelatihan Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan I-II Tahun Anggaran 2020	Angkatan I 11 s/d 21 Maret 2020	40 orang Peserta	40 orang Peserta	—	STTPL Telah dikirim ke peserta

4. Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Metode Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Angkatan I, II dan III TA 2020

Pelatihan ini merupakan program pelatihan yang ditujukan bagi Pelaksana Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang memberikan pemahaman secara teknis tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat dalam pelaksanaan tugas sehingga peserta mampu memberikan masukan kepada masyarakat yang merasa hak asasinya terlanggar setelah menganalisa dugaan pelanggaran HAM dalam proses hukum dengan baik.

Hasil kegiatan Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I dan II TA 2020 :

No.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I	Angkatan I 27 s/d 30 Juli 2020	40 orang Peserta	40 orang Peserta	—	STTPL Telah dikirim ke peserta
		Angkatan II 11 s/d 14 Agustus 2020	40 orang Peserta	40 orang Peserta	—	STTPL Telah dikirim ke peserta
		Angkatan III 28 September s/d 1 Oktober 2020	40 orang Peserta	40 orang Peserta	—	STTPL Telah dikirim ke peserta



5. Pelatihan E-Learning

Pelatihan E-Learning pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020 telah terlaksana sebanyak 3 kegiatan. Pelatihan E-Learning adalah Pelatihan yang dilaksanakan secara online.

Kegiatan Pelatihan E-Learning tersebut dijabarkan dalam Tabel dibawah:

No.	Nama kegiatan/ Diklat	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Lama Pelatihan	Jam Pelajaran	Rencana Penyelenggaraan Pelatihan	Keterangan Tempat Pelaksanaan
1.	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	2 Kegiatan	40 Orang	7 Hari	25 JP	16 – 22 Mei 2019	Balai Diklat
2.	Pelatihan Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	1 Kegiatan	40 Orang	14 Hari	55 JP	14 – 27 Mei 2019	Balai Diklat
3.	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar	1 Kegiatan	40 Orang	7 Hari	20 JP	12 – 18 Juni 2019	Balai Diklat



No.	Nama kegiatan/ Diklat	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Lama Pelatihan	Jam Pelajaran	Rencana Penyelenggaraan Pelatihan	Keterangan Tempat Pelaksanaan
6.	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjut	1 Kegiatan	40 Orang	7 Hari	20 JP	16 – 22 Juli 2019	Balai Diklat
7.	Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	40 Orang	7 Hari	20 JP	06 – 12 Agustus 2019	Balai Diklat

Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan dan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program Pendidikan dan Pelatihan mencapai sasaran yang diharapkan dengan penekanan pada aspek hasil (*output*). Evaluasi dalam pelatihan ini dilaksanakan dengan mengadakan Pre Test dan Post Test menggunakan aplikasi CBT (*Computer Based Test*).

I. Analisa dan Laporan Evaluasi

Selama berlangsungnya Pelatihan Klasikal dan E-Learning di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2020, penyelenggara kegiatan pelatihan telah melakukan pengamatan dan penilaian secara terus menerus terhadap aktivitas peserta didalam kelas maupun di luar kelas yang meliputi beberapa aspek.



II. Aspek Learning (pembelajaran)

Aspek ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah menerima materi dari para pengajar/narasumber setiap sesi materi pelatihan.

Evaluasi tersebut juga untuk mengetahui sejauh mana daya serap peserta pelatihan pada materi pelatihan yang telah diberikan. Dan biasanya data evaluasi diperoleh dengan membandingkan hasil dari pengukuran sebelum pelatihan atau tes awal (pree-test) dan sesudah pelatihan atau (post-test) dari setiap peserta. Pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga mencakup semua isi materi dari pelatihan. Materi pelatihan yang telah diberikan. Dan biasanya data evaluasi diperoleh dengan membandingkan hasil dari

pengukuran sebelum pelatihan atau (pree-test) dan sesudah pelatihan atau test akhir (post-test) dari peserta. Pertanyaan-pertanyaan disuingga mencakup semua isi materi dari pelatihan.

Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil 9 program percepatan Reformasi Birokrasi yang salah satunya adalah pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi yang biasa kita sebut e-gov maka Balai Diklat Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan pre-test dan post-test melalui sistim CBT (Computer Based Test).

Hasil Evaluasi

A. Hasil Evaluasi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi peserta terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Adapun tanggapan peserta secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan seperti pelaksanaan tepat waktu baik pembukaan/penutupan maupun pelaksanaan penyampaian materi, ada kelengkapan fasilitas yang cukup memadai dan bahan ajar/materi yang disampaikan cukup lengkap dan sesuai dengan kurikulum.

B. Hasil Evaluasi Peserta terhadap Tenaga Pengajar/Penceramah

Tenaga pengajar/penceramah yang menyampaikan materi mampu dalam penguasaan materi maupun penggunaan metode ajar, sehingga membuat suasana kelas terasa lebih hidup dan para peserta tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran, hal ini dilihat dari interaksi antara para tenaga pengajar/penceramah dan para peserta yang aktif dalam melakukan diskusi dan tanya jawab.

C. Hasil Evaluasi Peserta terhadap Sarana dan Prasarana serta Makanan

a). Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Hotel Gran Central Manado, cukup lengkap dan memadai. Fasilitas mulai dari kamar hotel yang bersih, ruang pertemuan yang cukup luas, kondisi lingkungan yang nyaman, serta fasilitas wifi yang cukup memadai.

b). Makanan

Makanan yang disajikan menu bervariasi dan lengkap, kebersihan dan rasa yang terjaga sehingga selama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat komplain dari para peserta, tenaga pengajar/penceramah maupun tamu undangan.

D. Kendala/Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Klasikal dan E-Learning di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 ini masih terdapat beberapa kendala/permasalahan yang timbul diantaranya adalah :

1. Untuk Klasikal karena pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di hotel, maka komunikasi antara penyelenggara dengan peserta kadangkala tidak lancar.
2. Jadwal yang disiapkan oleh penyelenggara sering berubah, karena pengajar berhalangan hadir sesuai yang dijadwalkan.



TERSEDIAANYA LAYANAN INTERNAL DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER

Pada program kegiatan ini terdapat beberapa *sub output* antara lain :

1. Penyusunan rencanan program dan penyusunan rencana anggaran
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
3. Pengelolaan keuangan
4. Pengelolaan kepegawaian
5. Pelayanan umum dan perlengkapan
6. Administrasi pengadaan barang dan jasa

Dari beberapa *sub output* tersebut telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yang menunjang pengembangan kompetensi yaitu dengan diadakannya *Workshop* Diseminasi Pengeloaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2019.



TERSELENGGARANYA LAYANAN GAJI DAN PERKANTORAN

Pada program kegiatan ini terdapat 2 (dua) *sub output*, di antaranya :

1. Gaji dan Tunjangan
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor



B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Pagu 2019 (Rp)	Penyerapan 2019 (Rp)	Capaian Penyerapan %
5249	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i>	13.194.630.000		
5249.001	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	11.232.897.000	9.065.310.117	80,70
5249.100	<i>Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	236.640.000	230.166.265	97,26
5249.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1.725.093.000	1.638.967.513	95,00
	Jumlah	13.194.630.000	10.934.443.895	82,87

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 13.194.630.000. Dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2019 telah menyerap anggaran senilai total Rp 10.934.443.895 atau sebesar 82,87% dari total anggaran.

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara

	Belanja Pegawai	Belanja Barang
Pagu	637.614.000	2.662.995.000
Capaian Realisasi	627.826.134	2.609.570.603
Presentase	98,46%	(97.99%)
Sisa Anggaran	9.787.866	53.424.397

Kegiatan pada Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara :

1. Pelatihan Teknis Petugas Pintu Utama Pada Lapas dan Rutan Angkatan I
2. Pelatihan Petugas Pintu Utama Pada Lapas dan Rutan Angkatan II
3. Pelatihan Petugas Pintu Utama Pada Lapas dan Rutan Angkatan III
4. Pelatihan Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan Angkatan I
5. Pelatihan Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan Angkatan II
6. Pelatihan Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I
7. Pelatihan Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan II
8. Pelatihan Bendaharawan Angkatan I
9. Pelatihan Bendaharawan Angkatan II
10. Pelatihan Teknis Keimigrasian Angkatan I
11. Pelatihan Teknis Keimigrasian Angkatan II
12. Administrasi Perkantoran Tk.Dasar metode e-learning
13. Administrasi Perkantoran Tk.Lanjutan metode e-learning
14. Muatan Teknis Substansi Lembaga metode e-learning
15. Pelayanan Publik Tk. Dasar metode e-learning
16. Pelayanan Publik Tk. Lanjutan metode e-learning
17. Reformasi Birokrasi metode e-learning
18. Pengelolaan Barang Milik Negara metode e-learning
19. Pelatihan Dasar CPNS (BPSDMD Sulawesi Utara)
20. Pelatihan Dasar CPNS (BPSDMD Sulawesi Selatan)

Realisasi Anggaran pada Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara :

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	4.653.000.000	4.545.006.628	107.993.372
5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	4.653.000.000	4.545.006.628	107.993.372
5249.001	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	1.247.878.000	1.209.629.715	38.248.285
5249.001.001	Tanpa Sub Output	1.247.878.000	1.209.629.715	38.248.285
051	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.247.878.000	1.209.629.715	38.248.285
A	<u>PELATIHAN TEKNIS PENGAMANAN TINGKAT DASAR 40 ORG, 7 HR, 2 KEG</u>	328.595.000	61.182.100	267.412.900
521211	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Bahan	84.560.000	55.182.100	29.377.900
521219	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.000.000	6.000.000	0
522141	[00000000-A-0-0-179-17-53] Beban Sewa	30.500.000	0	30.500.000
522151	[00000000-A-0-0-179-17-53] Beban Jasa Profesi	33.000.000	0	33.000.000
524111	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Biasa	173.035.000	0	173.035.000
524113	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.500.000	0	1.500.000
B	<u>PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN KEIMIGRASIAN 40 ORG, 7HR, 2 KEG</u>	724.338.000	308.464.113	415.873.887
521211	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Bahan	134.358.000	81.790.250	52.567.750
522141	[00000000-A-0-0-179-17-53] Beban Sewa	166.320.000	28.500.000	137.820.000
522151	[00000000-A-0-0-179-17-53] Beban Jasa Profesi	49.800.000	26.100.000	23.700.000
524111	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Biasa	369.360.000	168.913.863	200.446.137
524113	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.500.000	3.160.000	1.340.000
C	<u>PELATIHAN TEKNIS PENGAMANAN TINGKAT DASAR METODE</u>	6.250.000	681.258.502	-675.008.502
521211	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Bahan	3.250.000	93.632.000	-90.382.000
522141	[00000000-A-0-0-179-17-53] Beban Sewa	0	166.320.000	-166.320.000
522151	[00000000-A-0-0-179-17-53] Beban Jasa Profesi	3.000.000	49.800.000	-46.800.000
524111	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Biasa	0	368.931.502	-368.931.502
524113	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	0	2.575.000	-2.575.000
D	<u>PELATIHAN TEKNIS PENGAMANAN TINGKAT LANJUTAN METODE</u>	12.500.000	0	12.500.000
521211	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Bahan	6.500.000	0	6.500.000
522151	[00000000-A-0-0-179-17-53] Beban Jasa Profesi	6.000.000	0	6.000.000
E	<u>COMMUNITY OF PRACTICE</u>	64.400.000	54.200.000	10.200.000
521211	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Bahan	36.400.000	28.400.000	8.000.000
522151	[00000000-A-0-0-179-17-53] Beban Jasa Profesi	28.000.000	25.800.000	2.200.000
F	<u>Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Metode</u>	111.795.000	104.525.000	7.270.000
521211	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Bahan	8.775.000	8.755.000	20.000
522151	[00000000-A-0-0-179-17-53] Beban Jasa Profesi	36.000.000	36.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Biasa	65.670.000	59.770.000	5.900.000
524113	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.350.000	0	1.350.000
5249.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.352.391.000	1.307.609.763	44.781.237
5249.951.001	Tanpa Sub Output	1.352.391.000	1.307.609.763	44.781.237
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	274.109.000	269.836.600	4.272.400
A	<u>tanpa sub komponen</u>	274.109.000	269.836.600	4.272.400
532111	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	274.109.000	269.836.600	4.272.400
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	642.632.000	629.143.900	13.488.100
A	<u>Tanpa Sub Komponen</u>	642.632.000	629.143.900	13.488.100

532111	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	642.632.000	629.143.900	13.488.100
054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	435.650.000	408.629.263	27.020.737
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	435.650.000	408.629.263	27.020.737
533111	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Modal Gedung dan Bangunan	435.650.000	408.629.263	27.020.737
5249.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	352.193.000	348.116.908	4.076.092
5249.970.001	tanpa sub output	352.193.000	348.116.908	4.076.092
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	60.802.000	60.172.232	629.768
A	<u>tanpa sub komponen</u>	60.802.000	60.172.232	629.768
521211	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Bahan	2.050.000	1.508.500	541.500
524111	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Biasa	58.452.000	58.363.732	88.268
524113	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	300.000	300.000	0
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	104.015.000	103.747.216	267.784
A	<u>tanpa sub komponen</u>	104.015.000	103.747.216	267.784
521211	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Bahan	1.092.000	1.042.900	49.100
524111	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Biasa	102.023.000	101.804.316	218.684
524113	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	900.000	900.000	0
053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	20.360.000	20.357.600	2.400
A	<u>tanpa sub komponen</u>	20.360.000	20.357.600	2.400
521211	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Bahan	2.480.000	2.477.600	2.400
524111	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Biasa	13.080.000	13.080.000	0
524113	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.800.000	4.800.000	0
054	Pengelolaan kepegawaian	62.771.000	62.445.100	325.900
A	<u>tanpa sub komponen</u>	62.771.000	62.445.100	325.900
521211	[00000000-A-0-0-179-17-53] Belanja Bahan	17.271.000	17.240.100	30.900

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Estimasi Persentase Realisasi
1.	Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian	Angkatan I 10 s/d 15 Februari 2020	Rp. 328.595.000	Rp. 61.182.100	Rp. 267.412.900	99,82 %
2.	Pelatihan Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan Angkatan I & II (2 kegiatan)	Angkatan I : 12 – 18 Maret 2019 Angkatan II : 20 – 26 Maret 2019	Rp. 620.550.000	Rp. 618.780.000	Rp. 1.770.000	99,71 %
3.	Pelatihan Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I & II (2 kegiatan)	Angkatan I & II : 11 – 14 Juni 2019	Rp. 437.150.000	Rp. 436.470.000	Rp. 680.000	99,83 %

4.	Pelatihan Bendaharawan Angkatan I & II (2 kegiatan)	Angkatan I : 07-12 Juni 2019 Angkatan II : 25-30 Agustus 2019	Rp. 425.410.000	Rp. 412.377.500	Rp. 13.032.500	96,92%
5.	Pelatihan Pengawasan Orang Asing Angkatan I & II (2 kegiatan)	Angkatan I : 28 Juli – 03 Agustus 2019 Angkatan II : 10-16 November 2019	Rp. 724.650.000	Rp. 720.800.001	Rp 3.849.999	99,46 %
6.	Administrasi Perkantoran Tk.Dasar metode e-learning	11 – 22 Juli 2019	Rp. 8.750.000	Rp. 8.550.000	Rp. 200.000	97,71 %
7.	Administrasi Perkantoran Tk.Lanjutan metode e-learning	11 – 22 Juli 2019	Rp. 7.750.000	Rp. 6.150.000	Rp. 1.600.000	79,3 %
8.	Muatan Teknis Substansi Lembaga metode e-	14 – 18 Oktober	Rp. 14.750.000	Rp. 9.150.000	Rp. 5.600.000	62,03 %

	learning	2019				
9.	Pelayanan Publik Tk. Dasar metode e-learning	21 – 25 Oktober 2019	Rp. 7.750.000	Rp. 5.550.000	Rp. 2.200.000	71,61 %
10.	Pelayanan Publik Tk. Lanjutan metode e-learning	02 – 06 Desember 2019	Rp. 8.375.000	Rp. 6.775.000	Rp. 1.600.000	89,89%
11.	Reformasi Birokrasi metode e-learning	02 – 06 Desember 2019	Rp. 7.750.000	Rp. 6.150.000	Rp. 1.600.000	79,35%
12.	Pengelolaan Barang Milik Negara metode e-learning	09 – 13 Desember 2019	Rp. 14.750.000	Rp. 6.750.000	Rp. 8.000.000	45,76%
13.	Pelatihan Dasar CPNS	Gelombang I di BPSDMD Sulut : Gelombang II : 10-09-2019 s/d 08-11-2019	Rp. 7.976.957.000	Rp. 5.851.366.132	Rp. 2.125.590.868	73,35%
15.	Dukungan Manajemen Satker		Rp. 236.640.000	Rp. 230.166.265	Rp. 6.473.735	97,26%
16.	Layanan Operasional		Rp. 1.725.093.000	Rp. 1.638.967.513	Rp. 86.125.487	95 %
	Gaji dan Tunjangan		Rp. 486.554.000	Rp. 484.517.387	Rp. 2.036.613	95,58%
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp. 1.238.539.000	Rp. 1.154.450.126	Rp. 84.088.874	93,21%
	JUMLAH		Rp. 13.194.630.000	Rp. 10.934.443.895	Rp. 2.260.186.105	82,87%
	PENGHEMATAN					
	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PENGHEMATAN					

Realisasi Anggaran Kegiatan Pelatihan Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan (2 kegiatan):

kode	uraian	Jumlah	realisasi	Sisa	ket
A	Pelatihan Teknis Pelatihan Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan 2 Kegiatan	620.550.000	618.780.000	1.770.000	99,71 %
521211	Belanja Bahan	140.880.000	140.180.000	700.000	
522141	Beban Sewa	91.160.000	91.160.000	-	
522151	Beban Jasa Profesi	50.000.000	49.200.000	800.000	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	333.110.000	333.110.000	-	
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	5.400.000	5.130.000	270.000	

Pelatihan Teknis Petugas Pintu Utama Pada Lapas dan Rutan (3 kegiatan) :

kode	uraian	Jumlah	realisasi	Sisa	ket
B	Pelatihan Teknis Petugas Pintu Utama Pada Lapas dan Rutan	978.305.000	976.441.484	1.863.516	99,80 %
521211	Belanja Bahan	205.610.000	204.860.000	750.000	
522141	Beban Sewa	178.320.000	178.320.000	-	
522151	Beban Jasa Profesi	75.000.000	74.100.000	900.000	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	512.715.000	512.711.484	3.516	
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.660.000	6.450.000	210.000	

Pelatihan Teknis Pelatihan Pengawasan Orang Asing Angkatan (2 kegiatan) :

kode	uraian	Jumlah	realisasi	Sisa	ket
C	Pelatihan Pengawasan Orang Asing Angkatan 2 kegiatan	724.650.000	720.800.001	3.849.999	99,46 %
521211	Belanja Bahan	129.960.000	129.360.000	600.000	
522141	Beban Sewa	166.320.000	166.320.000	-	
522151	Beban Jasa Profesi	49.800.000	48.300.000	1.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	372.270.000	372.270.000	-	
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.300.000	4.550.001	1.749.999	

Pelatihan Bendaharawan (2 kegiatan) :

kode	Uraian	Jumlah	realisasi	Sisa	ket
D	Pelatihan Bendaharawan 2 kegiatan	425.410.000	412.377.500	13.032.500	96,92%
521211	Belanja Bahan	71.290.000	69.187.500	2.102.500	
521213	Honor Output Kegiatan	3.365.000	3.365.000	-	
522141	Beban Sewa	73.100.000	64.600.000	8.500.000	
522151	Beban Jasa Profesi	30.100.000	30.100.000	-	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	241.555.000	241.555.000	-	
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.000.000	3.570.000	2.430.000	

Pelatihan Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (2 kegiatan) :

kode	Uraian	Jumlah	realisasi	Sisa	Ket
E	Pelatihan Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (2 kegiatan)	437.150.000	436.470.000	680.000	99,84 %
521211	Belanja Bahan	70.370.000	70.370.000	-	
522141	Beban Sewa	64.260.000	64.260.000	-	
522151	Beban Jasa Profesi	24.000.000	24.000.000	-	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	275.220.000	275.220.000	-	
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.300.000	2.620.000	680.000	

Pelatihan e-learning 7 kegiatan :

kode	Uraian	Jumlah	realisasi	Sisa	Ket
F	Pelatihan Muatan Teknis Substantif Lembaga	14.750.000	9.150.000	5.600.000	62,03 %
521211	Belanja Bahan	3.750.000	3.750.000	-	
522151	Beban Jasa Profesi	11.000.000	5.400.000	5.600.000	
G	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tkt. Dasar	8.750.000	8.550.000	200.000	71,61 %
521211	Belanja Bahan	3.750.000	3.750.000	-	
522151	Beban Jasa Profesi	5.000.000	4.800.000	-	
H	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tkt. Lanjutan	7.750.000	6.150.000	1.600.000	79,3 %
521211	Belanja Bahan	3.750.000	3.750.000	-	
522151	Beban Jasa Profesi	4.000.000	2.400.000	-	

Dukungan Manajemen Satker :

I	Pelatihan Pelayanan Publik Tkt. Dasar	7.750.000	5.550.000	2.200.000	71,61 %
521211	Belanja Bahan	4.375.000	4.375.000	-	
522151	Beban Jasa Profesi	4.000.000	1.800.000	2.200.000	
J	Pelatihan Pelayanan Publik Tkt. Lanjutan	8.375.000	6.775.000	1.600.000	89,89%
521211	Belanja Bahan	3.750.000	3.750.000	-	
522151	Beban Jasa Profesi	4.000.000	2.400.000	1.600.000	
K	Pelatihan Barang Milik Negara	14.750.000	6.750.000	8.000.000	45,76%
521211	Belanja Bahan	3.750.000	3.750.000	-	
522151	Beban Jasa Profesi	11.000.000	3.000.000	8.000.000	
L	Pelatihan Reformasi Birokrasi	7.750.000	6.150.000	1.600.000	79,35%
521211	Belanja Bahan	4.375.000	4.375.000	-	
522151	Beban Jasa Profesi	4.000.000	2.400.000	1.600.000	

kode	Uraian	Jumlah	realisasi	Sisa	ket
	Dukungan Manajemen Satker	236.640.000	230.166.265	6.473.735	97,26%
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan dan Anggaran	59.860.000	59.548.488	311.512	
521211	Belanja Bahan	10.000.000	9.900.000	100.000	
522151	Belanja Perjalanan Biasa	48.060.000	47.898.488	161.512	
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	1.750.000	50.000	
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	51.200.000	50.812.777	387.223	
521211	Belanja Bahan	9.920.000	9.920.000	-	
522151	Belanja Perjalanan Biasa	39.480.000	39.142.777	337.223	
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	1.750.000	50.000	
053	Pengelolaan Keuangan	13.000.000	12.950.000	50.000	
521211	Belanja Bahan	10.000.000	9.950.000	-	
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.000.000	3.000.000	50.000	
054	Pengelolaan Kepegawaian	74.400.000	72.875.000	1.525.000	
521211	Belanja Bahan	27.500.000	27.500.000	-	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	22.000.000	20.900.000	1.100.000	
522151	Beban Jasa Profesi	24.000.000	23.600.000	400.000	
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	900.000	875.000	25.000	
055	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	17.300.000	15.500.000	1.800.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3.750.000	3.750.000	-	
521211	Belanja Bahan	4.000.000	2.400.000	1.600.000	
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	1.050.000	750.000	
056	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	20.880.000	18.480.000	2.400.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20.880.000	18.480.000	2.400.000	

Dukungan Manajemen Satker :
 Layanan Perkantoran :

kode	Uraian	Jumlah	realisasi	Sisa	ket
001	Layanan Perkantoran	1.725.093.000	1.638.967.513	86.125.487	95
					%
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	486.554.000	484.517.387	2.036.613	95,58%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	332.592.000	332.583.160	8.840	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.000	6.875	125	
511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	29.471.000	29.470.876	124	

511122	Belanja Tunj. Anak PNS	9.243.000	9.237.926	5.074	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40.326.000	40.320.000	6.000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2.038.000	1.012.450	1.025.550	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	22.089.000	22.088.100	900	
511129	Belanja Uang Makan PNS	40.128.000	39.138.000	990.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10.660.000	10.660.000	-	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.238.539.000	1.154.450.126	84.088.874	
A	Langganan Daya dan Jasa	67.200.000	32.451.218	34.748.782	
522111	Beban Langganan Listrik	30.000.000	10.698.662	19.301.338	
522112	Beban Langganan Telepon	1.200.000	0	1.200.000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	36.000.000	21.752.556	14.247.444	
B.	Perawatan Gedung Kantor	54.400.000	44.155.000	10.245.000	
523111	Belanja Keperluan Perkantoran	361.613.000	361.525.700	87.300	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.435.000	14.434.750	250	
C	PENUNJANG SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PERKANTORAN	376.048.000	375.960.450	87.550	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	361.613.000	361.525.700	87.300	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14.435.000	14.434.750	250	
D	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	91.200.000	57.000.000	34.200.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3.750.000	3.750.000	-	
E	PENGIRIMAN JASA POS DAN GIRO	7.783.000	4.799.200	2.983.800	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.783.000	4.799.200	2.983.800	
F	PERAWATAN INVENTARIS KANTOR	8.600.000	8.520.000	80.000	
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.600.000	8.520.000	80.000	
G	PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN SERAGAM	40.608.000	39.240.000	1.368.000	
521119	Belanja Barang Operasional lainnya	40.608.000	39.240.000	1.368.000	
H	SEWA KENDARAAN DAN PERALATAN	296.000.000	295.624.258	375.742	
522141	Beban Sewa	246.000.000	249.625.000	375.742	
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000	49.999.258	742	
I	KOORDINASI DAN KONSULTASI	8.600.000	8.520.000	80.000	

524111	Belanja Perjalanan Biasa	266.700.000	266.700.000	-	
J	JAMUAN TAMU	30.000.000	30.000.000	-	
521211	Belanja Bahan	30.000.000	30.000.000	-	

Kendala / Hambatan yang dihadapi dalam realisasi penyerapan Anggaran di Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Dalam pelatihan rutin yang dilaksanakan ada terdapat sisa anggaran khususnya pada beban perjalanan biasa (524111) hal itu disebabkan karena ada beberapa peserta dari luar wilayah yang berhalangan hadir sehingga digantikan dengan peserta lokal. Namun sisa anggaran tersebut sudah di optimalkan ke belanja pegawai untuk penyelesaian pagu minus.
2. Dalam pelaksanaan pelatihan dengan metode e-learning penyerapan anggaran khususnya pada belanja beban jasa profesi (522151) tidak maksimal hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan metode pelatihan yang berpengaruh pada jumlah jam pelajaran sehingga pembayaran honor tenaga pengajar menjadi berkurang.
3. Keterlambatan turunnya anggaran Latsar CPNS Tahun Anggaran 2019 juga mempengaruhi rendahnya realisasi, dengan adanya keterlambatan tersebut maka dilakukan penghematan pada belanja persiapan pelaksanaan Latsar.
4. Besaran biaya perjalanan peserta yang dianggarkan tidak sesuai dengan realisasi. Seperti contoh biaya tiket peserta yang dari Papua yang digunakan standar biaya masukan tertinggi sedangkan pada realisasinya rata-rata harga tiket yang digunakan di bawah standar biaya tersebut.
5. Jumlah mentor yang dianggarkan tidak sesuai dengan jumlah mentor yang hadir. Satu unit pelaksana teknis hanya diwakili oleh satu sampai dua orang mentor. Hal tersebut dikarenakan jabatan CPNS yang sama dibawah oleh satu orang atasan langsung yang bertindak sebagai mentor.
6. Mengalami beberapa kali penolakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pengajuan revisi karena terbentur dengan aturan revisi yang diatur dalam PMK revisi Tahun Anggaran 2019 khusus BABUN yang tidak memperkenankan adanya pergeseran anggaran maupun penambahan akun.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

- Capaian output Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2020 yaitu sebanyak 1054 orang yang terdiri dari 680 orang peserta Diklat Teknis dan 376 orang peserta Diklat Kepemimpinan (Latsar CPNS) sehingga di bandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 280 orang maka ada peningkatan
- Sedangkan untuk penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 Balai Diklat Hukum dan HAM masih berada di posisi 78,45 % faktor yang mempengaruhi adalah adanya anggaran latsar sebesar $\pm$ 2 Miliar yang tidak terealisasi, anggaran tersebut sebagian besar ada pada akun perjalanan dinas biasa (524111). Dari Rincian Anggaran Biaya (RAB) latsar yang kami terima anggaran perjalanan dinas untuk peserta dan mentor cukup besar dimana dianggarkan satu orang mentor untuk satu orang peserta namun pada realisasinya setiap unit pelaksana teknis hanya mengirimkan satu sampai dua orang mentor dengan alasan keterbatasan SDM dan juga menyesuaikan dengan jabatan peserta latsar contohnya jabatan penjaga tahanan peserta yang berasal dari Papua dan Papua Barat.
- Keterlambatan turunnya anggaran latsar juga menjadi faktor penyebab penyerapan anggaran sehingga di awal pelaksanaan latsar kami melakukan penghematan.
- Kami sudah memaksimalkan anggaran pada latsar dengan menambah detail kegiatan namun terkendala pada PMK revisi khusus BA BUN tidak memperkenankan untuk adanya pergeseran akun.